

Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Deli Serdang

Kamila, K¹, Nida Andina²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

kamila@uinsu.ac.id , nidaandina2000@gmail.com

ABSTRACT

The Regional Development Planning Agency, Research and Development (BAPPEDALITBANG) of Deli Serdang Regency is a regional technical institution in the field of regional development planning led by a head of the agency who is under and responsible to the Governor/Regent/Mayor through the regional secretariat. This study aims to assess the financial performance of Bappedalitbang Deli Serdang Regency for five fiscal years. In measuring financial performance, it is more focused on the Budget Realization Report (LRA). The measurement of financial performance is carried out to determine the absorption of the budget and the use of the budget during the five fiscal years on activities that exist in the agency itself. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of documentation. The analytical method used is descriptive method with the formula: compatibility analysis of spending which is divided into direct and indirect spending, effectiveness analysis, spending variance analysis, efficiency analysis and spending growth analysis. The results of the analysis show that the financial performance of the Deli Serdang Regency Bappedalitbang from 2019-2022 seen from the shopping compatibility analysis shows poor financial performance, because the total indirect spending is 51% and for direct spending 49%, so it can be said that the Bappedalitbang for the Regency Province Deli Serdang pays little attention to regional development. From the analysis of spending growth in 2019-2022 it is said to be good, because it can be seen that there has been a growth in spending for five years with a total of 1%, with a maximum value of 14% in 2019 and a minimum value of 3% in 2019. 2019-2022 can be said to be good, with a total comparison of 89%. However, judging from the effectiveness ratio of the use of the budget for five years, it can be said to be quite effective with the total ratio reaching 83%. Meanwhile, if viewed from the efficiency ratio, the Bappedalitbang Deli Serdang Regency is said to be quite efficient in using its budget from 2019-2022, with a total of 34 %, so in this case the Deli Serdang Regency Bappedalitbang has been able to make budget savings.

Keywords: Financial Performance, shopping compatibility ratio, efficiency, effectiveness, and variance.

ABSTRAK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Deli Serdang adalah lembaga teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui perangkat daerah. sekretariat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang selama lima tahun anggaran. Dalam mengukur kinerja keuangan lebih difokuskan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui penyerapan anggaran dan penggunaan anggaran selama lima tahun anggaran pada kegiatan yang ada di instansi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Metode analisis

yang digunakan adalah metode deskriptif dengan rumus: analisis kesesuaian belanja yang terbagi atas belanja langsung dan tidak langsung, analisis efektivitas, analisis varians belanja, analisis efisiensi dan analisis pertumbuhan belanja. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2019-2022 dilihat dari analisis kompatibilitas belanja menunjukkan kinerja keuangan yang buruk, karena total belanja tidak langsung 51% dan untuk belanja langsung 49%, sehingga dapat mengatakan bahwa Bappedalitbang Provinsi Kabupaten Deli Serdang kurang memperhatikan pembangunan daerah. Dari analisis pertumbuhan belanja tahun 2019-2022 dikatakan baik, karena terlihat telah terjadi pertumbuhan belanja selama lima tahun dengan total 1%, dengan nilai maksimal 14% pada tahun 2019 dan nilai minimal 3% pada tahun 2019. 2019-2022 dapat dikatakan baik, dengan total perbandingan sebesar 89%. Namun jika dilihat dari rasio efektivitas penggunaan anggaran selama lima tahun dapat dikatakan cukup efektif dengan total rasio mencapai 83%. Sedangkan jika dilihat dari rasio efisiensi, Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dikatakan cukup efisien dalam menggunakan anggarannya dari tahun 2019-2022, dengan total sebesar 34%, sehingga dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang sudah mampu membuat penghematan anggaran.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, rasio kompatibilitas belanja, efisiensi, efektivitas, dan varians.

PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai Pedoman Penguatan dan Perubahan Administrasi Kependetaan Majelis Mekanik Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ketentuan Khusus Penyelenggaraan Penyelenggaraan, Laporan Pelaksanaan dan Metodologi Peninjauan Laporan Penyelenggaraan Instansi Pemerintah merupakan sarana untuk menyampaikan data tentang berapa banyak Organisasi Pemerintah, untuk situasi ini Kantor Penataan Kemajuan Wilayah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Deli Serdang melakukan tindakan cerdas dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, kepala daerah dibantu oleh instrumen teritorial, salah satunya adalah Dinas Penataan Wilayah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang). Bappedalitbang adalah yayasan khusus teritorial di bidang ujian dan penataan kemajuan bappedalitbang pucuk bawahan pemimpin dapat diandalkan oleh wakil ketua/pejabat/pimpinan Kabupaten Deli Serdang. Kantor ini termasuk merencanakan bagaimana sebuah bangunan yang baru.

Kantor (Bappedalitbang) dirancang dengan membangun strategi pembangunan yang baru sesuai yang diinginkan, perbaikan dan rancangan di bagian penelitian, untuk mempermudah negara-negara tetangga dengan menyelesaikan pergantian peristiwa, khususnya dibagian penelitian, perspektif dalam siklus dinamis sepanjang waktu dan aturan untuk penyusunan rencana dan penggunaan belanja provinsi yang akan dilaksanakan.

Dalam memperkirakan eksekusi moneter pada Bappedalitbang Hal ini lebih berpusat pada estimasi Laporan Pengakuan Rencana Keuangan (LRA) di Bappedalitbang dengan menggunakan beberapa perhitungan investigasi proporsi, dimana estimasi proporsi di pemerintahan tidak sama dengan estimasi pemeriksaan

proporsi di organisasi perusahaan. Untuk situasi ini, Bappedalitbang harus benar-benar melengkapi penilaian ilmiah yang berbeda dalam penggunaan rencana pengeluaran dan juga konsumsi saat ini di kantor.

Undang-undang tidak resmi No 8 Tahun 2006 pasal 1, menyatakan berita acara pameran kerangka kerja yang mengungkap secara sekilas dan utuh capaian pertunjukan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD, kemudian dalam pedoman gerejawi Penguatan Mekanik Negara. Majelis dan Perubahan Tata Usaha Negara No 53 Tahun 2015, menyebutkan ternyata penyajian laporan ialah salah satu bentuk tanggung jawab atas penugasan dan kewenangan dimiliki bersama oleh penyelenggara pemerintahan dalam rangka pemanfaatan rencana belanja.

Sementara itu, perkiraan pelaksanaan moneter adalah salah satu cara untuk menunjukkan tanggung jawab, dan ini menunjukkan bagaimana pemerintah terdekat terdekat, khususnya Bappedalitbang, menunjuk tanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkap perkembangan setiap jenis atau tindakan yang dikendalikan dalam penggunaan. rencana. Upaya untuk lebih mendorong eksekusi harus disertai dengan ukuran eksekusi yang baik. Perkiraan pelaksanaan moneter untuk kepentingan umum dapat digunakan sebagai penilaian dan pembangunan kembali pelaksanaan dengan membandingkan alur pekerja. pengerjaan eksekusi moneter, terdiri atas Peraturan Bappedalitbang Toko Serdang dalam jangka waktu berikutnya. Bappedalitbang Peraturan Daerah Pertokoan Serdang sebagai pihak yang bergantung pada usaha menjalankan roda pemerintahan yang sedang dikembangkan diharapkan dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan provinsi untuk survei terlepas dari apakah Bappedalitbang dapat melakukan kewajibannya. dengan tepat.

Estimasi pelaksanaan area publik diselesaikan untuk memenuhi tiga tujuan, secara spesifik: pertama, estimasi pelaksanaan area publik diharapkan dapat membantu pengembangan lebih lanjut pelaksanaan pemerintah yang menyoroti pebekerja pada kemampuan dan kelangsungan hidup asosiasi area publik dalam menawarkan jenis bantuan publik. Kedua, langkah-langkah pelaksanaan area publik diharapkan untuk menyelesaikan tanggung jawab publik dan bekerja pada korespondensi institusional. Data ini berguna bagi klien laporan dalam menilai pilihan sehubungan dengan penugasan aset moneter, tanggung jawab, dan konsistensi pemerintah terdekat dengan rencana keuangan. Badan Penataan Kemajuan Wilayah, Kerja Inovatif (Bappedalitbang) Rezim Toko Serdang untuk situasi ini akan berusaha secara jujur untuk menyesuaikan diri dengan sarana dalam pengaturan pelaksanaan moneter Bappedalitbang, misalnya tidak adanya kelayakan dan efektivitas dalam perencanaan Laporan Pengakuan Rencana Belanja dengan alasan kadang-kadang ada referensi rencana keuangan yang tidak dapat dibuat karena.

RUMUSAN MASALAH

1. Berapa besar keserasian belanja pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2019-2022 apabila dilihat dari investigasi belanja langsung dan belanja bundaran?
2. Berapakah besar Rasio Efektivitas pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2019-2022?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui besar keserasian belanja pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2019-2022 apabila dilihat dari investigasi belanja langsung dan belanja bundaran?
2. Dapat mengetahui besar rasio Efektivitas pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2019-2022

TEMPAT DAN WAKTU

Penelitian ini bertempat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) di Jl. Karya Dharma No.2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini akan memakan waktu selama kurun waktu 1 bulan yaitu dari tanggal 01 Februari 2022 Sampai dengan tanggal 02 Maret 2022.

TINJAUAN LITERATUR

Arti dari Investigasi

Sebagaimana ditunjukkan oleh acuan Kata bahasa Indonesia, penilaian adalah penilaian terhadap suatu peristiwa (karya, kegiatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (penyebab, masalah, dan sebagainya), penjabaran suatu pokok bahasan dalam berbagai bagiannya. juga, pemeriksaan suku cadang asli dan sambungannya. antara bagian-bagian untuk mendapatkan pemahaman yang benar tanpa henti tentang makna keseluruhan. Penyelidikan berasal dari kata Yunani "analisis" yang artinya menyerah. Pemeriksaan dua suku kata, lebih eksplisit "Ana" yang berarti kembali dan "Luein" yang berarti menyerah. Dengan maksud bahwa permintaan percaya adalah upaya untuk melihat sesuatu atau sesuatu dengan membongkar bagian-bagian penyusunnya atau memesan bagian-bagian tersebut untuk tinjauan tambahan.

Secara umum, pemikiran investigasi adalah tindakan penalaran untuk menggambarkan subjek bagian-bagian sifat atau indikasi setiap bidang, jadi hubungan antara yang lain dan kapasitas setiap bagian. Investigasi laporan fiskal adalah siklus mendalam untuk membantu menilai posisi moneter masa sekarang dan sebelumnya, tujuannya terutama memutuskan evaluasi dan perkiraan yang paling mungkin sehubungan dengan kondisi dan pelaksanaan organisasi di kemudian hari. Penyelidikan laporan anggaran ini digunakan sebagai alat penyaringan yang mendasari opsi usaha sehubungan dengan negara terkait uang masa depan dan eksekusi, sebagai siklus ilmiah untuk isu-isu utama, usaha, atau isu-isu lain.

Mencari tahu Eksekusi

Eksekusi menurut referensi menindak lanjuti dengan sesuatu, sesuatu yang selesai. Eksekusi adalah hasil yang disampaikan oleh tanda tugas dalam waktu tertentu. Eksekusi diselesaikan oleh seorang individu atau perwakilan yang menghasilkan hasil, kemahiran, kelangsungan hidup yang dihubungkan dengan efisiensi sejauh kualitas dan jumlah yang ditunjukkan oleh yang diwakilinya. Dapat juga diartikan bahwa presentasi adalah akibat dari kemajuan seseorang atau sekelompok orang dalam menyelesaikan suatu pengembangan atau pekerjaan yang dapat memberikan hasil atau perilaku selama jangka waktu tertentu dalam mencapai tujuan individu perkumpulan suatu perkumpulan. Eksekusi juga merupakan penilaian atasan dalam mensurvei kemampuan bawahan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Eksekusi juga dapat digunakan dalam evaluasi cara seseorang berperilaku dalam menyelesaikan kewajibannya atau berperilaku terhadap kewajiban tugas yang diberikan. Seperti yang ditunjukkan oleh Sudarmanto, eksekusi adalah catatan hasil yang dibuat atau kapasitas kerja atau latihan tertentu selama jangka waktu tertentu. Sebagai perilaku pertunjukan, ini juga merupakan serangkaian pendekatan untuk bertindak sesuai dengan tujuan organisasi tempat karya tunggal.

Dapat di jelaskan Al-Qur'an suroh Alahqaf 46:19.

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أُعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”*. (Alahqaf 46:19).

Dari ayat bahwa Allah akan mengganti setiap perbuatan manusia sehubungan dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini benar-benar bermaksud bahwa dengan asumsi seseorang bekerja dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik untuk asosiasinya, ia juga akan mendapatkan hasil yang bagus dari pekerjaannya dan akan memberikan keuntungan untuk asosiasinya.

Menggenggam Eksekusi Moneter Kantor Bappedalitbang

Eksekusi moneter pemerintah teritorial adalah kapasitas kabupaten untuk memeriksa dan mengelola salah satu aset moneter daerah dalam mengatasi kebutuhannya untuk membantu menjalankan sistem kekuasaan publik, organisasi ke daerah dan perbaikan umum tanpa sepenuhnya tunduk pada pemerintah pusat dan memiliki fleksibilitas untuk menarik sumber daya untuk mendukung pemerintah lingkungan. jaringan terdekat di dalam tidak diatur oleh peraturan. Eksekusi moneter pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah hasil dari penyusunan program yang akan atau telah dicapai dalam rangka pemanfaatan rencana pemanfaatan lokal dengan kualitas dan jumlah yang dapat diukur., kemampuan wilayah dapat diperkirakan dengan mensurvei kemampuan administrasi daerah. daerah. sebagian pengertian di atas, cenderung dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan moneter badan-badan legislatif yang berdekatan adalah tingkat pencapaian suatu pekerjaan dalam ruang uang daerah yang mencakup rencana belanja dan penggunaan pengakuan rencana belanja yang masih mengudara melalui suatu strategi atau pengaturan hukum selama periode rencana pengeluaran.

Pemeriksaan Kesamaan Belanja

Investigasi kesamaan konsumsi adalah pemeriksaan yang diarahkan untuk melihat keselarasan antara semua penggunaan saat ini yang dihubungkan dengan kapasitas rencana keuangan untuk sirkulasi, distribusi, dan ketergantungan. Pemeriksaan kesamaan belanja sangat membantu untuk mewujudkan keselarasan antara pembelanjaan. Untuk mengetahui kesamaan belanja pemerintah daerah, penelitian ini dapat digunakan, dalam semua pengeluaran dengan asumsi pengeluaran yang menyimpang lebih penting daripada pengeluaran langsung yang dianggap buruk, begitu juga sebaliknya. Dengan asumsi penggunaan tenaga kerja adalah setengah penggunaan mutlak, orang mungkin mengatakan bahwa rencana keuangan tidak besar, begitu juga sebaliknya. Aturan untuk pemeriksaan kesamaan belanja adalah sebagai berikut:

Tabel I.I

Aturan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Sehari-hari

Aturan Belanja Sehari - hari	Nilai
Belanja Langsung > Belanja Berputar	Normal
Belanja Langsung > Belanja Berputar	Non Normal

Proporsi Kecukupan Belanja

Kecukupan adalah hubungan antara hasil dan target dapat diraih. terkait dengan pencapaian tujuan atau sasaran strategi (mengggunakan hasil). Latihan fungsional seharusnya berhasil dengan asumsi bahwa interaksi gerakan mencapai tujuan dan tujuan ekstrim dari pengaturan. Kecukupan Dalam pemerintahan terdekat dapat diartikan sebagai selesainya kegiatan tepat waktu dan dalam anggaran yang terjangkau, juga dapat mencapai tujuan dan konsentrasi yang sesuai dengan bentuknya. Semakin penting komitmen konsumsi yang dibuat untuk kepentingan pencapaian tujuan atau fokus yang telah ditetapkan, semakin menarik siklus kerja unit kerja yang dirujuk. Proporsi kecukupan digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel I.II

Aturan Evaluas Kecukupan Belanja Sehari-hari

Aturan Kecukupan Belanja	Nilai (%)
Sangat Baik	100% Ke atas
Baik	80 - 99%
Cukup Baik	88 - 98%
Kurang Baik	66 - 89%
Tidak Baik	60% Kebawah

Laporan Moneter Kantor Bappedalitbang

Laporan fiskal adalah hasil dari tanggung jawab eksekutif atas penggunaan aset dan sumber kekayaan yang dibagikan dengan mereka. Sebagai aturan umum,

laporan ini memberikan data tentang posisi moneter, eksekusi dan pendapatan untuk suatu periode. Di tingkat Kabupaten Deli Serdang, laporan ini direncanakan untuk klien laporan di luar iklim otoritas publik untuk ditinjau dan dipilih. Di sini, sumber informasinya adalah pemerintah ekologi yang bersangkutan. Materi di dalamnya adalah latihan otoritas publik dan aset moneter yang diberkahi. Kapasitas laporan fiskal adalah untuk menyampaikan data moneter kepada klien. Norma pengumuman moneter keseluruhan ini adalah aturan untuk pengenalan data dalam ringkasan fiskal untuk memenuhi kapasitas ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Penelitian ini menggunakan teknik subjektif yang digunakan dalam tinjauan ini. Khususnya dengan memimpin pertemuan dengan para saksi. Wawancara diarahkan untuk mengumpulkan informasi dengan cara menghubungkan data dengan masalah eksplorasi.

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Informasi penting, informasi yang diperoleh dengan memimpin penelitian lapangan langsung. Ditinjau dari jenisnya dalam penelitian ini menggunakan informasi esensial, yaitu informasi spesifik yang diperoleh dengan konsekuensi pemeriksaan persepsi yang langsung terkait dengan masalah tersebut.

Teknik pengumpulan data digunakan ialah:

Wawancara, khususnya dengan memimpin siklus pertukaran atau Q & A secara langsung kepada subjek, khususnya pekerja kantor BAPPEDALITBANG

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang

Badan Pembinaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappedda, adalah yayasan provinsi di bidang penjelajahan dan penataan wilayah dipimpin oleh seorang pimpinan tertinggi yang berada di bawah dan dapat diandalkan oleh kekuasaan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang dan untuk mengusahakan keselarasan peningkatan daerah, penting untuk memperluas kerukunan antara perbaikan dan kemajuan sektoral. daerah. Dengan tujuan akhir untuk menjamin kecepatan kemajuan, keseimbangan dan daya dukung pergantian wilayah, diperlukan pengaturan yang luas, terkoordinasi, terpadu dan ekonomis. Penataan kepengurusan diharapkan dapat memfasilitasi penataan kemajuan wilayah melalui bagian-bagian penguatan kelembagaan.

Dalam pergantian acara tambahan, untuk mempertegas kedudukan, kewajiban, dan unsur Bappedda sebagai komponen organ yang membantu tugas Wakil Ketua/Pejabat/Ketua Kota dalam pengaturan pandangan, maka Deklarasi Resmi Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Fondasi Organisasi Penataan Perbaikan Daerah diberikan yang pelaksanaannya diatur melalui Surat Keputusan Pendeta Rumah Nomor 185 Tahun 1980 tentang Tata Tertib dan Tata Kerja Dinas Penataan Wilayah Tingkat I dan Tingkat II Organisasi Penataan Perbaikan

Provinsi. Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan, Organisasi Penataan Perbaikan Daerah di Daerah Tingkat I disebut Bappeda Tingkat I, adalah suatu badan kepegawaian yang berada di bawah dan berada di bawah pimpinan perwakilan/Kepala Daerah Tingkat I. Selain itu Bappeda Tingkat II merupakan badan kepegawaian yang berada di bawah dan dapat diandalkan oleh Kepala Dinas Kota/madya Kepala Daerah Tingkat II. Kewenangan Bappeda terdiri dari: direktur, sekretariat, bidang penelitian, bidang keuangan, bidang sosial sosial, fisik dan area pondasi, pengukuran dan laporan.

Dengan Masa Kemerdekaan Kabupaten Deli Serdang yang dipisahkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 22 Tahun 1999 tentang Kemandirian Daerah dan Peraturan Daerah No 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Dana Pusat dan Daerah, berdampak pada pembinaan kelembagaan alat Bappedalitbang. Untuk menyelesaikan tugas karena pengangkatan kekuasaan dari tengah ke daerah, diberikan undang-undang tidak resmi Nomor 84 Tahun 2000 tentang Tata Tertib Perhimpunan Mekanik Teritorial (Surat Kabar Negara Tahun 2000 Nomor 165), yang kemudian menjadi alasan. untuk pembentukan Bappeda di tingkat Umum dan Peraturan/Perdata. Kota. Dalam jangka panjang, secara praktis pedoman tersebut mengalami perubahan/modifikasi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai beberapa kali direvisi, paling akhir dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Buku Harian Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Kertas Indonesia Nomor 5679). Aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perakitan Mekanik Teritorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pemasarakatan. . Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengumpulan Mekanik Terdekat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) dan Peraturan Menteri Usaha Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Penggolongan Umum dan Rezim/Kota Provinsi Melengkapi Kemampuan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Untuk melingkari kembali pelaksanaan pedoman tersebut, maka diberikan Perda Provinsi Rezim Toko Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Bagian Rakitan Mekanik Kabupaten Deli Serdang.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Dinas Toko Serdang No 29 Tahun 2020 mengenai Kedudukan, Hierarki Perancangan, Kewajiban dan Kapasitas serta Tata Kerja Organisasi Penatausahaan Perbaikan Toko Rezim Provinsi Serdang, kedudukan BAPPEDA merupakan komponen penunjang pemerintah daerah di bidang pengaturan kemajuan dengan tugas mendasar membantu Ofisial dalam memutuskan strategi. penyusunan kemajuan serta mencari koordinasi antara rencana perbaikan daerah, provinsi dan publik.

Penjelasan Laporan Keuangan

Laporan fiskal adalah alat penting untuk mendapatkan data tentang posisi moneter dan hasil yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Ringkasan fiskal adalah penggambaran Dalam Bappedalitbang tahun 2019-2022 dapat di jelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel I.III
Laporan Realisasi Anggaran
Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022

Uraian	2019		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	26.812.770.489	24.251.102.408	25.290.186.910	21.177.386.222
Belanja Operasional	26.002.128.779	23.361.825.408	24.630.328.810	20.659.121.222
1. Belanja Pegawai	13.400.240.468	12.111.257.608	13.220.168.350	10.183.371.222
2. Belanja Barang dan Jasa	11.400.689.221	10.150.467.700	10.300.150.360	9.385.440.000
Belanja Modal	811.650.500	779.078.000	556.758.000	408.465.000
1. Peralatan dan Mesin	611.150.500	600.400.000	550.258.000	400.130.000
2. Aset Tetap lainnya	100.400.000	199.578.000	8.400.000	7.135.000

Uraian	2020	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	26.133.107.600	24.106.119.759
Belanja Operasional	24.721.187.600	22.776.754.759
Belanja Pegawai	10.665.441.000	9.833.259.085
Belanja Barang dan Jasa	13.145.545.600	11.853.395.664
Belanja Modal	1.210.740.000	1.110.275.000
Alat-alat dan Mesin	3.202.740.009	3.110.275.009
Aset Tetap DLL	7.020.000	7.020.000

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang

Dari tabel di atas dapat dimaklumi bahwa setiap tahun pemanfaatan rencana keuangan dalam organisasi, khususnya Bappeda Daerah Sumatera Utara, terombang-ambing, yang bisa dibilang naik turun nya peminat. Selalu dibuat perubahan dapat menarik ketika kami melakukan pemeriksaan. Untuk situasi ini, perubahan dan pengembangan klien rencana pengeluaran adalah salah satu sudut penting dalam mensurvei presentasi keuangan organisasi.

Pelaksanaan

Dalam tahap Pelaksanaan Aset Bappedalitbang Pengurus di Kabupaten deli Serdang, Pemkot berperan dalam melaksanakan pencadangan bappedalitbang para

pengurus karena Pemkot melakukan latihan sesuai bidangnya. Majelis mekanik kota semuanya mengambil bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya sekretaris sebagai pelaksana khusus yang dibantu dengan panel sesuai bidangnya, misalnya dalam hal uang dibantu oleh petugas keuangan, sebagai Sejauh perbaikan ada dewan kemajuan sebagai individu yang mendorong pelaksanaan kemajuan program dari Aset Bappedalitbang, dan untuk masalah bisnis. Organisasi keuangan sekretaris Bappedalitbang dibantu oleh pemodal.

Ujian Kecakapan Belanja

Untuk evaluasi uji kemahiran konsumsi, bisa dikatakan bahwa Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang sudah sangat piawai dalam menyikapi setiap pemanfaatan rencana keuangannya. Karena mengingat aturan dan efek samping dari perhitungan ini, ia telah menjelaskan situasinya. Sangat baik terlihat dari pemeriksaan mutlak dalam waktu yang lama, yaitu 35%. defisit bilangan di atas 70% atau tak melewatkan rencana keuangan. Untuk itu, Toko Serdang Peraturan Bappedalitbang dapat membuat rencana pengeluaran dana investasi selama lima tahun moneter.

Pemeriksaan Fluktuasi Belanja

Pameran moneter konsumsi provinsi Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang 2019-2022 dilihat dari Fluktuasi Penggunaan Wilayah, secara keseluruhan sangat baik mungkin seharusnya besar, karena ada hasil buruk yang menunjukkan bahwa ada dana cadangan dalam pemanfaatan keuangan pengakuan rencana. hal ini ditunjukkan dengan pemeriksaan lengkap sebesar 87%. Dan selanjutnya pengakuan pengeluaran tidak melebihi apa yang telah direncanakan. Alasan dana investasi rencana pengeluaran adalah karena pengakuan rencana keuangan tidak melebihi apa yang direncanakan. Sehingga sisa dana cadangan bisa dimanfaatkan untuk tahun yang akan datang, sementara efeknya tidak dibelanjakan APBD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dilihat dari hasil penelusuran keterangan dan pembicaraan yang telah dilakukan, maka dapat dimaklumi bahwa Pelaksanaan Keuangan Kabupaten Deli Serdang Peraturan Bappedalitbang dilihat dari kesamaan pengeluaran, secara keseluruhan cenderung terlihat bahwa sebagian besar cadangan penggunaan lokal dialokasikan untuk pengeluaran yang menyimpang, dan sisanya dialokasikan untuk pengeluaran langsung. Selama empat tahun rencana keuangan Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dinilai kurang baik dalam memanfaatkan rencana keuangannya, khususnya pada tahun 2019 hingga 2022, dengan alasan selama empat tahun tersebut Peraturan Bappedalitbang Toko Serdang lebih berpusat pada pendanaan backhanded. pengeluaran. Sementara itu, pada tahun 2020 Bappedalitbang diharapkan dapat memanfaatkan perencanaan keuangannya dengan baik dengan membuat dana cadangan pada pengeluaran yang berputar-putar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, 2009. Bandung: CV Penerbit di ponegoro.
- Andhiantoko, Hony, 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Blora Tahun 2007-2011*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Assidiqi, Bahrin, 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten Tahun 2008-2012*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Edy, Prasetya Gede, 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hanggreni, 2015. *Teori Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta: Penerbit Caps
- Ikhsan, Arfan, 2012. *Analisis Laporan keuangan*, Medan: Madanetra.
- Wakhyudi, 2013. *Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmiah.
- Wandira, Ayu, 2015. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.